

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Landasan teori dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika principal mempekerjakan agent untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen¹⁶. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (stakeholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham selaku pemilik.

Hal ini dapat menimbulkan adanya *agency conflict*, yaitu perbedaan kepentingan antara pemilik dengan manajer yang mengakibatkan kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Berkaitan dengan masalah keagenan, *good corporate governance* berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan investor bahwa mereka akan menerima return dari investasi yang mereka tanamkan di perusahaan. *Good*

¹⁶ Jensen, Michael C., William H. Meckling. 2016. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics.

Corporate Governance berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer dapat menguntungkan mereka, manajer tidak akan menggelapkan dana atau berbuat curang terhadap laporan keuangan, dan bagaimana investor mengontrol para manajer¹⁷.

2. ***Good Corporate Governance***

Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009, *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).¹⁸

Definisi *Good Corporate Governance* menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggung jawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur).

GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para shareholders khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham,

¹⁷ Sheifer, Andrei, and Robert W Vishny. 1986. *Large Shareholders and Corporate Control*. *Journal of Political Economy* 94 (3)pp : 461-488

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 “*Tentang Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah*”

dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.¹⁹

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.²⁰

Berdasarkan argumen yang dikembangkan oleh Keasey dan Wright dalam Sayidah (2015) *corporate governance* dipandang mempunyai dua dimensi besar. Pertama monitoring terhadap kinerja manajemen dan meyakinkan akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham yang menekankan pertanggungjawaban dan dimensi akuntabilitas dari *corporate governance*. Kedua, struktur, mekanisme dan proses *governance* yang memotivasi perilaku manajerial untuk meningkatkan kemakmuran bisnis dan perusahaan. Kedua perspektif tersebut perlu dipertimbangkan ketika ada usaha untuk menciptakan struktur dan prosedur *governance* yang mengarah ke perbaikan kinerja.²¹

¹⁹ Zarkasyi Wahyudin, “*Good Corporate Governance*”. (Bandung : Afabeta.2008), hlm.35

²⁰ FCGI, “*Corporate Governance: tata kelola perusahaan*”, edisi ketiga, (Jakarta:2001)

²¹ Sayidah Nur, “*Pengaruh kualitas Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan public (Studi kasus peringkat 10 besar CGPI tahun 2003-2005)*”, 2007. JAAI, Vol.II,I, hlm:1-19

Dari berbagai definisi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan :

- Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran komisaris independen, Direksi, RUPS dan para *stakeholder* lainnya.
- Suatu sistem Check and balance mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
- Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

a. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

1. Transparansi (*transparency*)

Pengertian prinsip transparansi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Konsep *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi.²²

²² Organization For Economic Cooperation and Development. 2004. *OECD Principles of Corporate Governance 2004. The OECD Paris*

Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

Prinsip transparansi meliputi pengungkapan informasi yang bersifat penting, informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas, penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien. Sehingga para pengelola perbankan syariah harus meletakkan tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada mereka.²³

2. Pertanggung jawaban (*responsibility*)

Pertanggung jawaban adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Responsibilitas adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggung jawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini tercermin dalam kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders, seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha.²⁴

Menurut Linan dalam Hastuti (2005) juga menyatakan bahwa prinsip pertanggung jawaban ini meliputi antara lain, menjamin hak pihak-pihak

²³ Wibowo, "Membangun Perbankan Syariah menuju Good Corporate Governance", www.pesantren.uui.ac.id. [21 Februari 2016]

²⁴ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 "Tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah"

berkepentingan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan, dan jika perlu, para pihak yang berkepentingan harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan.²⁵

3. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Menurut OECD (2004) prinsip ini dapat dijalankan dengan cara adanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggung jawaban dari organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Konsepsi *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen perusahaan yang dilakukan oleh komisaris independen, dan akuntabilitasnya terhadap perusahaan dan pemegang saham dan anggota direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Prinsip akuntabilitas ini meliputi pengetahuan bahwa anggota Dewan Direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen, dan adanya akses terhadap informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.²⁶

²⁵ Hastuti Tresia, "*Hubungan antara Good Corporate Governance dan struktur kepemilikan dengan kinerja keuangan*" (studi kasus pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta), (SNA VIII Solo), hlm. 238

²⁶ OECD, "*Principle of Corporate Governance*".
www.oecd.org/daf/governance/principle/html. [21 Februari 2016]

Dalam prakteknya perbankan syariah juga harus benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini terdapat peran penting Dewan Pengawas syariah dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.²⁷

4. Profesional (*professional*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, profesional adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.²⁸

Prinsip ini menekankan agar pengelolaan perbankan syariah sebaiknya dikelola secara profesional ataupun tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain sehingga *conflict of interest* dapat dihindari sejauh mungkin. Jadi sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang mandiri, bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi merugikan *stakeholders* dan mampu mengambil keputusan secara obyektif. Penerapan prinsip independensi dapat dilakukan dengan cara:²⁹

- 1) Penunjukan komisaris independen dan komite audit.
- 2) Pengambilan keputusan manajemen yang obyektif.
- 3) Penerapan sistem pengendalian intern yang sehat.
- 4) Penerapan fungsi manajemen resiko.

²⁷ Wibowo, "Membangun Perbankan Syariah menuju Good Corporate Governance", www.pesantren.uui.ac.id. [21 Februari 2016]

²⁸ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah".

²⁹ Luqman, "Penerapan Sistem Syariah Terhadap GLC's pada Sektor Perbankan". www.luqmannomic.wordpress.com/.../penerapan-sistemsyariah-terhadap-glc's-pada sektor perbankan/. [21 Februari 2016]

b. Kewajaran (*fairness*)

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Menurut FCGI prinsip kewajaran ini meliputi, Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab komisaris independen, Direksi, dan Komite, termasuk sistem remunerasi, menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apa pun, mengedepankan *Equal Job Opportunity*. Prinsip kewajaran diungkapkan dalam adanya perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham dan perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.³¹

³⁰ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah".

³¹ FCGI, "Corporate Governance: tata kelola perusahaan", edisi ketiga, (Jakarta:2001)

b. Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan GCG yang baik, antara lain:³²

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholders value* dan dividen.

c. Mekanisme *Corporate Governance*

Adanya dua partisipan prinsipal dan agen menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya, maka muncul lah mekanisme *corporate governance*. Mekanisme tata kelola perusahaan akan mampu mengurangi perampasan sumber daya bank dan mempromosikan efisiensi

³² FCGI, "Corporate Governance: tata kelola perusahaan", edisi ketiga, (Jakarta:2001)

bank. Ini adalah salah satu fakta mengenai pentingnya tata kelola perusahaan perbankan.³³

Good Corporate Governance biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian beberapa dari pengendalian ini terletak pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham institusional, dan pengendalian dari mekanisme pasar. Sukses tidaknya perusahaan akan sangat ditentukan oleh keputusan atau strategi yang diambil perusahaan. Dewan memegang peranan yang sangat signifikan bahkan peran utama dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep *twotier*, dimana dewan terdiri dari Dewan Direksi dan komisaris independen.³⁴

Selain itu, bank umum syariah perlu untuk membentuk dewan pengawas syariah dalam rangka memurnikan dan menyesuaikan berbagai model dan instrumen keuangan bank dengan ketentuan syariah.

Sehingga mekanisme *corporate governance* yang menjadi indikator dari *good corporate governance* dalam penelitian ini adalah :

³³ Caprio, "Governance and Bank Valuation", Working paper No.10158, National of Economic Research

³⁴ Wardhani, "Mekanisme Corporate Governance dalam perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan (financially Distressed firms)", symposium Nasional Akuntansi 9 Padang:2010, hlm.1-26

1. Kepemilikan Institusional

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan, termasuk investasi saham³⁵. Komunitas bisnis menaruh perhatian besar untuk meningkatkan kepemilikan oleh investor institusional di pasar agar dapat lebih banyak memengaruhi kebijakan perusahaan. Oleh karena institusi memantau secara professional perkembangan investasinya, sehingga tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen menjadi sangat tinggi dan potensi kecurangan dapat ditekan. Keberadaan institusi inilah yang kemudian digunakan sebagai alat monitoring yang efektif bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

2. Komisaris Independen

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengharuskan adanya kelembagaan komisaris sebagai salah satu organ perseoran. Keberadaan komisaris di Indonesia telah dikenal sejak lama, namun peranan dan tanggung jawabnya sebagai organ perseoran dan penyelia sering dipandang sebelah mata. Sehingga, untuk mengimplementasikan *good corporate governance* dibuatlah sebuah organ tambahan dalam struktur perseoran, yaitu komisaris independen.

Selain untuk tujuan tersebut, pembentukan komisaris independen juga dimotivasi oleh keinginan untuk memberi perlindungan yang lebih hakiki terhadap pemegang saham minoritas dalam PT.Terbuka³⁶. komisaris

³⁵ Kurnianingsih, Retno. Bambang Supomo. 2009. *Peran, Komposisi, dan Kinerja Komite Audit*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi.1(2) pp.149.

³⁶ Tadikapury, Violetta Jingga.2011. *Penerapan Good Corporate Governance* (tugas akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Jurusan Akuntansi).

independen independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari dewan direksi, komisaris independen maupun para pemegang saham atau dengan kata lain komisaris independen independen adalah komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan dewan direksi maupun pemegang saham.

Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat, atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. komisaris independen tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota komisaris independen termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama adalah mengkoordinasikan kegiatan komisaris independen agar pelaksanaan tugas komisaris independen dapat berjalan secara efektif.

Dalam butir 1-a dari Peraturan Pencatatan Efek No 1-A PT.Bursa Efek Jakarta mengenai ketentuan umum pencatatan efek yang bersifat ekuitas di bursa, mengatur tentang rasio komisaris independen dengan menyatakan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya adalah 30 persen dari jumlah anggota komisaris³⁷. Hal tersebut menegaskan bahwa komisaris independen harus berperan untuk mewakili kepentingan minoritas dan diharakan mampu bertindak sebagai penyeimbang dalam pengawasan perusahaan publik.

³⁷ Effendi, Muh.Arif. 2009. *The Power of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. (Jakarta. Salemba Empat) hal. 133

3. Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas kepengurusan bank. Dewan Direksi berperan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan digunakan baik kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Wallace dan Zinkin direksi merupakan seseorang yang semestinya memutuskan atau biasanya memberi keputusan, bersama-sama dengan anggota Dewan Direksi lainnya dalam menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan.³⁸

Dewan direksi merupaakan perwakilan para pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan. Dewan Direksi memiliki 35 tanggung jawab untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dewan Direksi harus dapat memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dewan. Dewan Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh komisaris independen, pemeliharaan suatu struktur organisasai, dan memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif. Dewan Direksi juga berperan dalam meningkatkan hubungan dengan pihak luar perbankan. Hubungan perbankan dengan pihak luar sangat penting bagi perbankan dalam proses menghimpun dan menyalurkan dana.

4. Komite Audit

Selain komisaris Independen, komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam penerapan prinsip *good corporate governance*. Ikatan

³⁸ Pranata, Y. 2017. Pengaruh Penerapan GCG Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. UII. Yogyakarta

Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh komisaris, dandengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *good corporate governance* di perusahaan-perusahaan³⁹.

Komite Audit juga dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan komisaris dengan pihak manajemen dalam hal pengendalian internal perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas komite audit adalah membantu komisaris independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

5. Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan pasal 6 Huruf M Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang perbankan menjelaskan bahwa dalam suatu Lembaga perbankan Islam harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah.⁴⁰ Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip Syariah.⁴¹

³⁹ Effendi, Muh.Arif. 2009. *The Power of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. (Jakarta. Salemba Empat) hal. 125

⁴⁰ Widyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.*, Hal 103

⁴¹ PBI No, 11/33/PBI/2009

Jumlah pengawas Syariah sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyaknya lima orang.

Pasal PBI No.6/24/PBI/2004, menguraikan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, yaitu :

- a) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN.
- b) Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c) Memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
- e) Menyampaikan laporan hasil pengawasan Syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada dewan direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

3. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase⁴². Pada perbankan, earning yang diperoleh merupakan sebuah tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan bank dimana kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba ditentukan seberapa nilai profit yang dicapai. Semakin tinggi earning, maka semakin mencerminkan bahwa bank tersebut memiliki kinerja yang baik. Kinerja bank yang baik

⁴² Hasibuan, M.S.P. (2007). *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT. Bumi Aksar)

menandakan kesehatan bank yang baik pula. Penilaian kesehatan yang baik pada bank dapat berimbas pada pemilik modal, sehingga semakin sehat bank tersebut maka pemilik modal semakin diuntungkan. Keuntungan bagi pemilik modal dapat berupa laba bersih yang diperoleh dari ekuitas yang dimiliki perusahaan, yang dihitung menggunakan *Return On Asset* (ROA).

□ *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh laba bersih⁴³. Peningkatan daya Tarik ini menjadikan perusahaan tersebut makin diminati, karena tingkat pengembalian akan semakin besar.

Rumus untuk menghitung *Return On Asset* (ROA) adalah

$$ROA = \frac{\text{Laba sesudah pajak} \times 100\%}{\text{Total Aset}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, peneliti melihat bahwa apa yang menjadi masalah pokok dalam kepenelitian ini tampaknya sangat penting dan prospektif untuk diteliti. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan pustaka :

Anggry Ferryta Permata Andayani (2016) dengan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* Terhadap Kepuasan Nasabah

⁴³ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service), 2015). hlm, 226

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulung Agung Ngunut”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada taraf signifikansi 5%.⁴⁴

Desna Arani (2017) “Hubungan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada taraf signifikansi 5%.⁴⁵

Maria Rofina dan Maswar Patuh Priyadi (2017) “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di BEI”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *net profit margin*, penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *return on investment*, dan penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *return on equity*.⁴⁶

Prasojo (2017) “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan penerapan *good corporate governance* berpengaruh signifikan positif terhadap *Capital Adequary*, *Ratio Return On Assets*, *Return On Equity Financing to Deposit Ratio* dan *Biaya Operasi Pendapatan Operasi*.⁴⁷

⁴⁴ Anggry Ferryta Permata Andayani, *Penerapan Good Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Ngunut*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2016

⁴⁵ Desna Arani, *Hubungan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Mandiri*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma 2017

⁴⁶ Maria Rofina dan Maswar Patuh Priyadi, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di BEI*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 2017

⁴⁷ Prasojo, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah* Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta 2017

Robby Hartono Putra (2017) “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan.⁴⁸

Sam’ani (2018) “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *leverage* Terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2017”. hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa pengaruh *corporate governance* yang diproksi oleh aktivitas komisaris, proksi dewan direksi, komite audit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan rasio *leverage* mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kinerja. Akan tetapi variabel komisaris independen secara signifikan tidak dapat mempengaruhi kinerja.⁴⁹

Maria Fransisca Widyawati (2017) “Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh⁵⁰

⁴⁸ Robby Hartono Putra, *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan*, (Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA Surabaya No.8 Vol. 6 diakses dari <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/download/3343/2857> pada 5 Desember 2017, 2017)

⁴⁹ Sam’ani, *Pengaruh Good Corporate Governance dan leverage Terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2017*, Universitas Diponegoro Semarang 2018

⁵⁰ Maria Fransisca Widyawati, *Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite*

Zabri, Shafie Mohamed & Kamila Ahmad (2015) “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara GCG dan ROA ROE.⁵¹

Arifani (2015) “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan ROE”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara komite audit, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Laksana (2015) “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan ROA”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara komite audit, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap kinerja keuangan ROA.

Agung Santoso Putra dan Nila Firdausi Nuzula (2015) “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas ROA dan ROE”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen terhadap kinerja keuangan ROA, namun tidak berpengaruh terhadap ROE.

David Tjondro dan R.Wilopo (2015) “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEI”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara GCG terhadap Profitabilitas ROA, ROE dan NIM (*Net Interest Margin*).

⁵¹ Zabri, Shafie Mohamed & Ahmad, Kamila . 2015.*Corporate Governance Practices and Firm Performance: Evidence from Top 100 Public Listed Companies in Malaysia*. Procedia Economics and Finance 35 (2016).

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Terdahulu	Peneliti
1	Anggry Ferryta Permata Andayani	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Sharia Compliance</i> Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulung Agung Ngunut	1. variabel X (Independen) yang digunakan 2 yaitu <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Sharia Compliance</i> 2. variabel dependen yang digunakan adalah kepuasan nasabah	1. variabel X (Independen) yang digunakan hanya satu yaitu <i>Good Corporate Governance</i> 2. variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas
2	Desna Arani	Hubungan Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Mandiri	indikator GCG yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan	indikator GCG yang digunakan adalah untuk mengukur proksi kepemilikan institusional, komisaris independen independen, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah

3	Maria Rofina dan Maswar Patuh Priyadi	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di BEI	1. Indikator GCG yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 2. Variabel kinerja keuangan yang diukur ada 3 dengan melihat <i>return on investment (ROI)</i>, <i>net profit margin (NPM)</i>, dan <i>return on equity (ROE)</i>	1. Indikator GCG yang digunakan adalah untuk mengukur proksi kepemilikan institusional, komisaris independen independen, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah 2. Variabel kinerja keuangan diukur dengan melihat <i>return on Asset (ROA)</i>
4	Prasojo	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah	1. Indikator GCG yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 2. Variabel kinerja keuangan yang diukur ada 4 yaitu : <i>Capital Adequary</i>, <i>Ratio Return On Assets (ROA)</i> , <i>Return On Equity (ROE)</i>, <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan Biaya Operasi Pendapatan Operasi	1. Indikator GCG yang digunakan adalah untuk mengukur proksi kepemilikan institusional, komisaris independen independen, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah 2. Variabel kinerja keuangan yang diukur yaitu <i>return on Asset (ROA)</i>
5	Robby Hartono Putra	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan	1. Objek penelitian yaitu perusahaan 2. Indikator GCG yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan	1. Objek penelitian yaitu Bank umum syariah 2. Indikator GCG yang digunakan adalah untuk mengukur proksi kepemilikan institusional, komisaris independen independen, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah

6	Sam'ani	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004-2007	1. Objek penelitian yaitu Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004-2007 2. Indikator GCG yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 3. variabel X (Independen) yang digunakan 2 yaitu <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i>	1. Objek penelitian yaitu Bank umum syariah 2. Indikator GCG yang digunakan adalah untuk mengukur proksi kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah 3. variabel X (Independen) yang digunakan hanya <i>Good Corporate Governance</i>
7	Zabri, Shafie Mohamed & Kamila Ahmad	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan (2015)	1. Indikator GCG yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 2. Variabel kinerja keuangan yang diukur ada 2 dengan melihat <i>return on Asset (ROA)</i>, <i>return on equity (ROE)</i>	1. Indikator GCG yang digunakan adalah untuk mengukur proksi kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah 2. Variabel kinerja keuangan diukur dengan melihat <i>return on Asset (ROA)</i>
8	Arifani	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan ROE (2015)	1. Indikator GCG yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 2. Variabel kinerja keuangan yang diukur yaitu <i>return on equity (ROE)</i>	1. Indikator GCG yang digunakan adalah untuk mengukur proksi kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah 2. Variabel kinerja keuangan diukur dengan melihat <i>return on Asset (ROA)</i>

9	Laksana	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan ROA (2015)	Indikator GCG yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan	Indikator GCG yang digunakan adalah untuk mengukur proksi kepemilikan institusional, komisaris independen independen, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah
10	Agung Santoso Putra dan Nila Firdausi Nuzula	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas ROA dan ROE (2015)	Variabel kinerja keuangan yang diukur yaitu <i>return on equity (ROE)</i> dan <i>return on Asset (ROA)</i>	Variabel kinerja keuangan yang diukur yaitu <i>Return Asset (ROA)</i>
11	David Tjondro dan R.Wilopo	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEI (2015)	1. Variabel kinerja keuangan yang diukur yaitu <i>return on equity (ROE)</i> , <i>return on Asset (ROA)</i> dan <i>Net Interest Margin (NIM)</i> 2. Indikator GCG yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan kinerja saham	1. Variabel kinerja keuangan yang diukur yaitu <i>Return Asset (ROA)</i> 2. Indikator GCG yang digunakan untuk mengukur profitabilitas.

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

C. Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Good Corporate Government (GCG)* Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan Penelitian Agung Santoso Putra dan Nila Firdausi Nuzula (2015) serta David Tjondro dan R.Wilopo (2015) menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu Pengaruh GCG Terhadap Nilai
Perusahaan

N o.	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Terdahulu	Peneliti
1.	Agung Santoso Putra dan Nila Firdausi Nuzula (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas ROA dan ROE	Variabel kinerja keuangan yang diukur yaitu <i>return on equity (ROE)</i> dan <i>return on Asset (ROA)</i>	Variabel kinerja keuangan yang diukur yaitu <i>Return Asset (ROA)</i>
2.	David Tjondro dan R.Wilopo (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEI	1. Variabel kinerja keuangan yang diukur yaitu <i>return on equity (ROE)</i> , <i>return on Asset (ROA)</i> dan <i>Net Interest Margin (NIM)</i> 2. Indikator GCG yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan kinerja saham	1. Variabel kinerja keuangan yang diukur yaitu <i>Return Asset (ROA)</i> 2. Indikator GCG yang digunakan untuk mengukur profitabilitas.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dirumuskan hipotesis berikut:

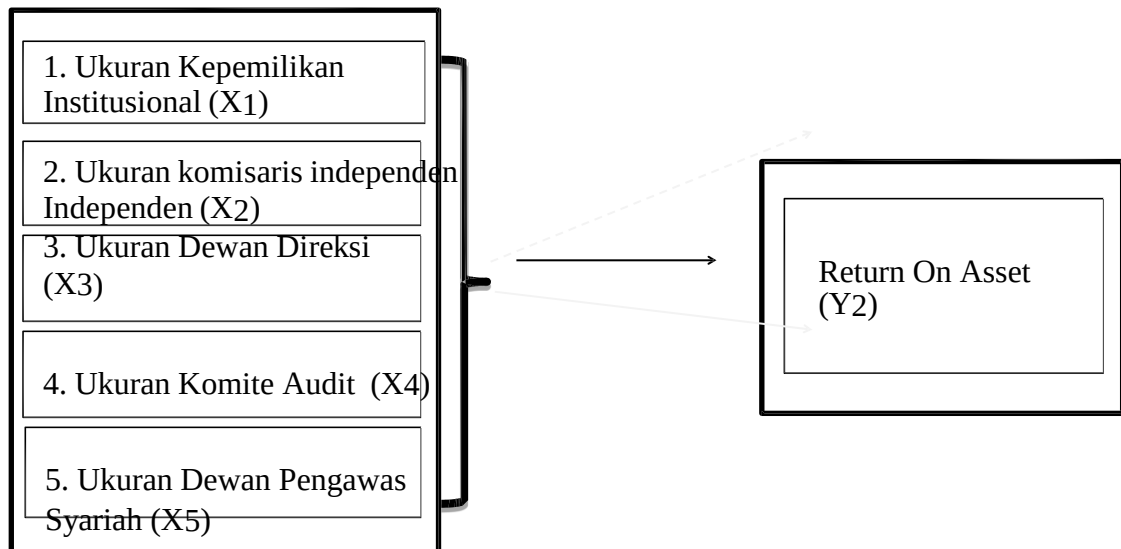
H1 : GCG berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA)

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di definisikan sebagai hal penting.⁵² Maka kerangka konseptual yang disajikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

⁵² Wulandari, Frida Setya Ayu . *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Merek Terhadap keputusan pemilihan Produk Tabungan (Studi Pada Bank BNI Syariah Yogyakarta)* 2015, hlm 36.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber : Dikembangkan dalam penelitian ini

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji kebenarannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis juga dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara atas pokok permasalahan yang akan diuji kebenarannya.⁵³ Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu pengujian atau test yang disebut tes hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, teori-teori yang mendukung dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : GCG berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA)

⁵³ Prasetyo, Bambang. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif. Teori dan Aplikasi. Jakarta : Rajawali Pers, hlm 76.